

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT KOMISI X DPR RI

(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, PEMUDA DAN OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)

Tahun Sidang

2023 - 2024

Masa Persidangan

Sifat Rapat

Terbuka

Jenis Rapat

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)

Dengan

BEM Seluruh Indonesia (SI)

Hari/Tanggal

: Kamis, 16 Mei 2024

Pukul

10.00 - Selesai

Tempat

Ruang Rapat Komisi X DPR RI

Pimpinan Rapat

Dr. Abdul Fikri Faqih, MM./Wakil Ketua Komisi X DPR

Sekretaris Rapat

Agenda

Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabagset, Komisi X.

: Penyampaian Aspirasi tentang Kenaikan Biaya

Pendidikan Tinggi

Hadir Komisi X DPR RI

Hadir

: 27 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI

: 1. Herianto (Koordinator Pusat BEM SI/Presiden

Mahasiswa Univ. Mataram)

2. Maulana Ihsanul Huda (Koordinator Isu Pendidikan Tinggi/Presiden BEM Univ. Jenderal Sudirman)

3. Farid Darmawan (Koordinator Isu Hukum dan HAM/Ketua BEM Univ. Diponegoro)

4. Farras Raihan (Koordinator Wilayah Jateng, DIY, Jatim/Ketua BEM Univ. Negeri Yogyakarta)

5. Muhammad Gamal (Koordinator Isu Minerba/Presma ITPLN)

6. Tsabit Syahidan (Koordinator Wilayah Jabodetabek/Ketua BEM Univ. Negeri Jakarta)

7. Muhammad Sumbagsel/Presma Univ. Riau)

Ravi (Koordinator

8. Ridhoan P Hutasuhut (Koordinator Wilayah Sumbagut/Presma Univ. Bengkulu)

9. Agung Lucky Pradita (Koordinator Media/Presma BEM Univ. Sebelas Maret)

10. Vava Ariella Aufa Azura (Anggota)

11. Alta Kurnia Hondoyo (Anggota)

12. Ivannindra Juan Kesawa (Anggota)

13. Rialdy (Anggota)

14. Aji Satya Darma (Anggota)

15. Muhammad Akbar Aviko (Anggota)

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.46 WIB oleh Dr. Abdul Fikri Faqih, M.M./Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari perwakilan BEM SI, serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN

- Komisi X DPR RI mengapresiasi aspirasi dan masukan dari BEM SI mengenai kenaikan biaya pendidikan tinggi. Beberapa poin yang disampaikan dan perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.
 - a. Negara lepas tangan dalam sektor pendidikan tinggi, hal tersebut terlihat dari pengalokasian APBN untuk pendidikan tinggi yang tidak optimal dan pemberlakuan kebijakan PTN BH.
 - b. Permendikbudristek RI No. 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai tindak lanjut dari Keputusan Mendikbudristek Nomor 54/P/2024 tentang Besaran SSBOPT menimbulkan masalah yakni angka standar biaya operasional yang ditetapkan tidak memperhitungkan perbedaan konteks dan kebutuhan antara institusi-institusi perguruan tinggi.
 - c. Pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan di dunia pendidikan yang menimbulkan komersialisasi pendidikan.
- 2. Terhadap aspirasi dan masukan yang disampaikan BEM SI, Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan sebagai berikut:
 - a. meminta BEM SI untuk melakukan kajian untuk mengidentifikasi permasalahan umum yang terjadi di perguruan tinggi sebagai masukan sehingga diperoleh kebijakan yang tepat mengenai biaya pendidikan tinggi.
 - b. mendorong pemerintah agar tidak membebankan biaya pendidikan tinggi pada masyarakat saja.
 - c. mendorong pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan pembiayaan pendidikan tinggi.
- 3. Komisi X DPR RI mendesak pencabutan Permendikbudristek RI No. 2 Tahun 2024.
- 4. Komisi X DPR RI akan segera melakukan Rapat Kerja dengan Kemendikbudristek RI untuk membahas mengenai permasalahan biaya pendidikan tinggi.
- 5. Komisi X DPRI RI membentuk Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan Pendidikan diantaranya untuk merespon mengenai permasalahan biaya pendidikan tinggi.

III.PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 13.00 WIB.

KETUA RAPAT

TTD

Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM